

**LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
( Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, Calk )



**BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2019**

## **I. DAFTAR ISI**

## **II. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
NERACA

## **III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KATA PENGANTAR

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD**

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Pencapaian Kinerja

### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam SAP pada OPD

### **BAB V PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

- 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan

- 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Lampiran Operasional
  - 5.3.1. Pendapatan
  - 5.3.2. Beban
  - 5.3.3. Surplus/Depisit
- 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

## BAB VI PENUTUP

## II. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Di Jakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 21 Februari 2020  
KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
DAERAH PROVINSI JAMBI  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN



REFLI, SH  
Pembina  
NIP. 19690404 199103 1 006

### III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Keuangan OPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang berkualitas dan Pemerintah yang bersih guna tercapainya WTP, diperlukan pengelolaan Daerah secara profesional dan transparan serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu sudah menjadi kewajiban bagi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa, pada akhir tahun anggaran setiap OPD menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sebagai pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632).

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
DAERAH PROVINSI JAMBI

Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN



REFLI, SH

Pembina

NIP. 19690404 199103

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Maksud :

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Keuangan OPD adalah sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD pada tahun pelaporan dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan :

Secara umum tujuan dari Laporan Keuangan OPD adalah untuk memberikan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2019 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.471.450.000,00,- mencapai 48,20% dari anggaran sebesar Rp. 3.053.080.000,00,-

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 17.903.667.629,60,- atau mencapai 88,73% dari anggaran sebesar Rp. 20.178.171.233,00,-

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2019 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan

Jumlah aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 35.510.524.103,06 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 183.247.247,30 investasi jangka panjang sebesar Rp. 00, aset tetap sebesar Rp. 36.213.767.891,78, dana cadangan Rp.0,00 dan aset lainnya sebesar Rp.50.020.000,00, Jumlah kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 74.182.659,00,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. , - dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0,00.

## Laporan Keuangan Tahun 2019

---

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 36.372.852.480,08.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.468.850.000,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp. 16.052.835.764,27-, sehingga terdapat surplus/defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 14.583.985.764,27-

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Depisit- LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

EKUITAS AWAL sebesar Rp. 36.630.290.731,13, SSURPLUS/DEFISIT-LO (Rp. 14.583.985.764,27), DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR terdiri dari : Koreksi Ekuitas Penyusutan Aset Tetap (Rp. 7.992.000,00) Koreksi Ekuitas Penyusutan Aset Lainnya (Rp. 1.212.612.922,40), Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap (Rp. 1.821.576.230,00), KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN Rp. 16.432.217.629,60 dan EKUITAS AKHIR sebesar Rp. 35.436.341.444,06.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah

dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2012, Perubahan Kedua Pergub Nomor 02 Tahun 2013 dan Perubahan Ketiga Pergub Nomor 34 Tahun 2013;

### 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Informasi umum tentang entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

#### 2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi meliputi berbagai aspek dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi meliputi sisi Pendapatan dan Pengeluaran. Penerimaan meliputi aspek Pendapatan Retribusi Mess sedangkan Pengeluaran meliputi aspek Belanja Operasi dan Belanja Modal

#### 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai 7(tujuh) Program dimana dari masing-masing Program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<b>7.126.849.572,00</b>	<b>6.551.370.623,60</b>	<b>91,93</b>
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	36.065.000,00	29.974.750,00	83,11
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.164.000.000,00	893.995.516,00	76,80
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	21.000.000,00	19.590.000,00	93,29
Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	190.000.000,00	180.424.931,60	94,96
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	250.476.700,00	217.098.050,00	86,67
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.087.037.700,00	1.050.442.169,00	96,63
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	103.732.150,00	98.927.900,00	95,37

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.880.500,00	49.375.000,00	98,99
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	42.035.000,00	40.039.800,00	95,25
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29.000.000,00	27.000.000,00	93,10
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	1.047.707.000,00	958.310.778,00	91,47
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.435.915.522,00	1.435.551.729,00	99,97
Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah	0	0	0
Kegiatan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	1.670.000.000,00	1.550.640.000,00	92,85
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.905.751.028,00</b>	<b>4.356.238.705,00</b>	<b>88,80</b>
Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.400.000.000,00	2.200.060.000,00	91,67
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	809.784.000,00	509.836.862,00	62,96
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	469.000.000,00	459.497.266,00	97,97
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	737.967.028,00	698.335.577,00	94,63
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	242.000.000,00	241.919.000,00	99,97
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	247.000.000,00	246.590.000,00	99,83

## Laporan Keuangan Tahun 2019

listrik dan elektronik			
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>60.625.000,00</b>	<b>93,27</b>
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	65.000.000,00	60.625.000,00	93,27
<b>Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>24.800.000,00</b>	<b>75,61</b>
Kegiatan kursus, diklat, pelatihan, sosialisidan bimbingan teknis	32.800.000,00	24.800.000,00	75,61
<b>Program Penunjang pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ wakil kepala daerah</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>100</b>
Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.000.000,00	49.000.000,00	100
<b>Program fasilitasi Hubungan Daerah, lembaga dan kemasyarakatan</b>	<b>119.581.000,00</b>	<b>118.804.000,00</b>	<b>99,35</b>
Kegiatan sarasehan masyarakat Jambi Jakarta	119.581.000,00	118.804.000,00	99,35
<b>Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah</b>	<b>895.018.400,00</b>	<b>893.015.900,00</b>	<b>99,78</b>
Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi	895.018.400,00	893.015.900,00	99,78
<b>JUMLAH</b>	<b>13.194.000.000,00</b>	<b>12.053.854.228,60</b>	<b>91,36</b>

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi TA 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.053.080.000,- untuk Pendapatan, dan Rp. 20.178.171.233,- untuk Belanja Daerah, yang terdiri dari Rp. 17.084.767.233,- untuk Belanja Operasi dan Rp. 3.093.404.000,- untuk Belanja Modal.

Realisasi target kinerja keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahu 2019 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut :

Tabel 1  
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan  
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi  
Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pendapatan	3.053.080.000,00	1.471.450.000,00	1.581.630.000,00
Belanja	20.178.171.233,00	17.903.667.629,60	2.274.503.603,40
Belanja Operasi	17.084.767.233,00	15.310.034.129,60	1.774.733.103,40
Belanja Modal	3.093.404.000,00	2.593.633.500,00	499.770.500,00
Surplus/Defisit	(17.125.091.233,00)	(16.432.217.629,60)	692.873.603,40

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, secara umum realisasi Pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.471.450.000,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 3.053.080.000,-. Sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp. 17.903.667.629,60,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 20.178.171.233,00,-. Selisih lebih/kurang sebesar Rp. 2.274.503.603,40,- sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja daerah. Untuk surplus/defisit terdapat defisit sebesar Rp. Rp. 692.873.603,40,-.

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi. beberapa hambatan atau kendala adalah sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian target Pendapatan, dalam hal ini Retribusi Mess terdapat hambatan atau kendala dimana banyaknya berdiri hotel-hotel diwilayah Jakarta, sehingga terjadi persaingan. Persaingan tersebut meliputi persaingan harga, mereka menawarkan harga diskon antara lain bagi yang memiliki SPPD.
2. Dalam realisasi Belanja, dalam hal ini Belanja Langsung menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pada tahun yang berjalan.

## BAB 1V

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek-praktek yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

#### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menerapkan basis akruwal dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Proses penerapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan adalah pengukuran laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban .

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

- Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a. Pendapatan
  - b. Belanja
- Dalam Laporan Realisasi Anggaran, jenis pendapatan asli daerah berupa pendapatan retribusi daerah, sedangkan jenis belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal terdiri dari peralatan dan mesin.
- Akuntansi Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian oleh manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan dan belanja.
- Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
- Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan menjadi alokasi estimasi pendapatan.
- Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.
- Pendapatan diakui paada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum daerah.
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
- Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

### 2. Neraca

- Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (akhir tahun anggaran)
- Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.
- Neraca mencantumkan pos-pos sebagai berikut :
  - a. ASET
  - b. KEWAJIBAN
  - c. EKUITAS

#### a. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah ataupun masyarakatm.

#### Aset Lancar

- Aset Lancar adalah Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai dalam waktu 12 belas bulan sejak tanggal pelaporan.  
Aset lancar pada neraca meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya ,penyisihan piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

#### Aset tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.
- Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan- irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pekerjaan dan akumulasi penyusutan.

### b. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara sama seperti aset lancar.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

### c. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

Pagu Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 pengesahan tanggal 7 Januari 2019 adalah sebesar Rp.18.168.347.807,00. Sesuai dengan surat Kepala Badan Penghubung Nomor S.900/210/Bapegdaprov-1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penyampaian Pergeseran dan Penambahan APBD 2019 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Pada tanggal 13 Sempember 2019 terdapat perubahan Pagu Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam DPPA-SKPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdapat penambahan dan pergeseran sehingga Pagu DPA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp. 20.178.171.233,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Jumlah Pagu	
No.Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.674.347.807,00</b>	<b>6.984.171.233,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	5.674.347.807,00	6.984.171.233,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>12.494.000.000,00</b>	<b>13.194.000.000,00</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	1.031.418.700,00	1.031.418.700,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.952.763.272,00	9.069.177.300,00
5.2.3	Belanja Modal	2.509.818.028,00	3.093.404.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.168.347.807,00</b>	<b>20.178.171.233,00</b>

Berikut ini adalah perubahan-perubahan belanja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi :

NO	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5.674.347.807,00</b>	<b>6.984.171.233,00</b>	<b>1.309.823.426,00</b>
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.674.347.807,00	6.984.171.233,00	1.309.823.426,00

## Laporan Keuangan Tahun 2019

<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>12.494.000.000,0</b>	<b>13.194.000.000,0</b>	<b>700.000.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :</b>	<b>6.979.734.572,00</b>	<b>7.126.849.572,00</b>	<b>147.115.000,00</b>
	Kegiatan jasa surat menyurat	33.950.000,00	36.065.000,00	2.115.000,00
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	942.707.000,00	1.047.707.000,00	105.000.000,00
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.095.915.522,00	1.435.915.522,00	340.000.000,00
	Kegiatan transportasi, akomodasi dan konsumsi	1.970.000.000,00	1.670.000.000,00	(300.000.000,00)
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :</b>	<b>4.362.866.028,00</b>	<b>4.905.751.028,00</b>	<b>542.885.000,00</b>
	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.700.000.000,00	2.400.000.000,00	700.000.000,00
	Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	926.198.028,00	809.784.000,00	(116.414.028,00)
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung ktr	499.000.000,00	469.000.000,00	(30.000.000,00)
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	693.668.000,00	737.967.028,00	44.299.026,00
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	272.000.000,00	242.000.000,00	(30.000.000,00)
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik	272.000.000,00	247.000.000,00	(25.000.000,00)

## Laporan Keuangan Tahun 2019

3	<b>Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur :</b>	22.800.000,00	32.800.000,00	10.000.000,00
	‘- Kegiatan kursus, diklat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	22.800.000,00	17.800.000,00	(5.000.000,00)

### 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

#### 5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.471.450.000,00. Keseluruhan Pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi merupakan Pendapatan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 62.450.000,00 atau 4,24 persen dibandingkan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2018 Rp.1.409.000.000,00 disebabkan berkurangnya Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Ruangan dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Perbandingan realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1  
Perbandingan Pendapatan Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah :				
‘-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Ruangan	49.700.000,00	39.100.000,00	10.600.000,00	21,32
‘-Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.421.750.000,00	1.369.900.000,00	51.850.000,00	3,64
<b>JUMLAH</b>	<b>1.471.450.000,00</b>	<b>1.409.000.000,00</b>	<b>62.450.000,00</b>	<b>4,24</b>

# Laporan Keuangan Tahun 2019

## 5.1.2 Belanja

Realisasi belanja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 sebesar Rp.17.903.667.629,60 atau 88,73% persen dari anggaran sebesar Rp. 20.178.171.233,00

Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2019

Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi Belanja	% realisasi
No.Urut	Uraian	Rp	Rp	
5.2.1	BELANJA OPERASI			
5.2.1.1	Belanja Pegawai	8.015.589.933,00	6.842.352.701,00	85,36
5.2.1.2	Belanja Barang	9.069.177.300,00	8.467.681.428,60	93,37
5.2.2	BELANJA MODAL			
5.2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	3.093.404.233,00	2.593.633.500,00	83,84
<b>JUMLAH</b>		<b>20.178.171.233,00</b>	<b>17.903.667.629,60</b>	<b>88,73</b>

Realisasi belanja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.868.333.969,00 dibandingkan realisasi belanja TA 2018 disebabkan adanya peningkatan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Perbandingan realisasi belanja Tahun 2019 dan Tahun 2018 disajikan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3  
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan 2018

Jenis Belanja		Realisasi		Naik/Turun	
No Urut	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (RP)	Naik/Turun	%
5.2.1.1	Belanja Pegawai	6.842.352.701,00	6.117.198.321,00	725.849.262,00	10,60
5.2.1.2	Belanja Barang	8.467.681.428,60	8.611.569.221,39	(143.887.793,00)	(1,69)
5.2.2.1	Belanja Peralatan Mesin	2.593.633.500,00	307.261.000,00	2.286.372.500,00	88,15
<b>JUMLAH</b>		<b>17.903.667.629,60</b>	<b>15.036.028.542,39</b>	<b>2.868.333.969,00</b>	<b>16,02</b>

## Laporan Keuangan Tahun 2019

### 5.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 sebesar Rp 6.842.352.701,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp 6.117.198.321,00 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 disajikan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.811.902.019,00	3.602.648.285,00	94,51
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.172.269.214,00	2.247.165.116,00	70,84
Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT)	821.567.000,00	816.000.000,00	74,95
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	209.851.700,00	176.539.300,00	84,10
<b>JUMLAH</b>	<b>8.015.589.933,00</b>	<b>6.842.352.701,00</b>	<b>85,36</b>

Realisasi belanja pegawai Tahun 2019 sebesar Rp 6.842.352.701,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 terdapat peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp. 725.154.380,00 disebabkan karena adanya penambahan mutasi pegawai pada Badan Penghubung Daerah Provinsi. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5  
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	(Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.602.648.285,00	3.446.294.317,00	61.073.809,00	1,80
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.247.165.116,00	1.715.794.754,00	146.651.034,00	0,85

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT)	816.000.000,00	792.312.000,00	(60.000.000,00)	(0,79)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	176.539.300,00	162.797.250,00	33.633.500,00	
JUMLAH	6.842.352.701,00	6.117.198.321,00	267.835.219,00	4.62

### 5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 sebesar Rp. 8.467.681.428,60 dan Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 8.611.569.221,39. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 disajikan pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Alat Tulis Kantor	115.600.550,00	110.476.300,00	95,80
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery kering)	42.035.000,00	40.039.800,00	92,25
Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	4.065.000,00	4.054.000,00	99,73
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	75.751.500,00	73.273.500,00	96,73
Belanja Pengisian Tabung Pemadam kebakaran	14.060.000,00	13.950.000,00	99,22
Belanja Pengisian Tabung Gas	6.940.000,00	5.640.000,00	81,27
Biaya alat rumah tangga pakai habis	213.306.200,00	207.669.185,00	97,36
Biaya Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Biaya Dekorasi	37.500.000,00	37.460.000,00	99,80
Biaya Publikasi	4.500.000,00	4.300.000,00	95,65
Belanja seminar Kit	8.767.000,00	8.739.000,00	99,68
Belanja Telepon	50.000.000,00	10.886.158,00	21,77
Belanja Air	72.000.000,00	36.819.248,00	51,14
Belanja Listrik	850.000.000,00	656.885.610,00	77,28
Belanja Surat Kabar/Majalah	6.800.000,00	4.800.000,00	70,59
Belanja Paket/Pengiriman	23.000.000,00	16.920.750,00	73,57
Biaya TV Cabel, Internet Cyberspace dan Multimedia	168.000.000,00	165.404.500,00	98,46
Belanja Jasa perizinan dan administrasi	140.000.000,00	130.752.166,00	93,39

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Belanja Jasa Kebersihan Kantor	720.000.000,00	695.852.846,00	96,65
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	190.000.000,00	180.424.931,60	94,96
Belanja Jasa Service	221.041.028,00	219.784.043,00	99,43
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	282.926.000,00	282.750.134,00	99,94
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	51.801.400,00	57,56
Belanja Cetak	161.573.000,00	161.008.750,00	99,65
Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.997.500,00	99,95
Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.000.000,00	117.910.000,00	98,26
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.396.500,00	94.765.000,00	99,34
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.002.000.000,00	915.975.778,00	91,41
Belanja Pakaian Sipil Harian	65.000.000,00	60.625.000,00	93,27
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.915.522,00	226.250.000,00	98,84
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.214.800.000,00	1.209.751.729,00	99,58
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	24.350.000,00	97,40
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.000.000,00	169.919.000,00	99,95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	233.000.000,00	232.745.100,00	99,98
Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya	175.000.000,00	174.590.000,00	99,77
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	299.700.000,00	297.700.000,00	99,33
Belanja untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
Belanja Transportasi Peserta	1.565.000.000,00	1.445.640.000,00	92,37
Belanja Akomodasi Peserta/Panitia	280.500.000,00	280.500.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>9.069.177.300,00</b>	<b>8.467.681.428,60</b>	<b>93,37</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar Rp. 8.467.681.420,60 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 terdapat penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 143.887.793,00 atau (1,67) persen.

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi		Naik/turun	
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Rp	%
Belanja Alat Tulis Kantor	110.476.300,00	101.346.000,00	9.130.300,00	8,26
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery kering)	40.039.800,00	41.800.000,00	(1.760.200,00)	(4,21)
Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya	4.054.000,00	1.350.000,00	2.704.000,00	66,70
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	73.273.500,00	95.713.750,00	(22.440.250,00)	(30,63)
Belanja Pengisian Tabung Pemadam kebakaran	13.950.000,00	14.000.000,00	(50.000,00)	(0,36)
Belanja Pengisian Tabung Gas	5.640.000,00	5.200.000,00	440.000,00	7,80
Biaya alat rumah tangga pakai habis	207.669.185,00	114.100.700,00		
Biaya Dokumentasi	10.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(60)
Biaya Dekorasi	37.460.000,00	21.120.000,00	16.340.000,00	43,62
Belanja Publikasi	4.300.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00	34,88
Belanja seminar Kit	8.739.000,00	0	8.739.000,00	100
Belanja Telepon	10.886.158,00	16.612.469,00	(5.726.311,00)	(34,47)
Belanja Air	36.819.248,00	50.439.448,00	(13.620.200,00)	(27,00)
Belanja Listrik	656.885.610,00	638.922.952,00	17.962.658,00	2,73
Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	3.125.000,00	1.675.000,00	30,63
Belanja Paket/Pengiriman	16.920.750,00	1.950.000,00	14.970.750,00	88,48
Biaya TV Cabel, Internet Cyberspace dan Multimedia	165.404.500,00	133.608.000,00	31.796.500,00	19,22
Belanja Jasa perizinan dan administrasi	130.752.166,00	124.492.030,00	6.260.136,00	4,79

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Belanja Jasa Kebersihan Kantor	695.852.846,00	663.649.330,00	32.203.516,00	4,63
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	180.424.931,60	187.128.837,39	(6.703.906,00)	(3,58)
Belanja Jasa Service	219.784.043,00	88.643.527,00	131.140.516	59,67
Belanja Penggantian Suku cadang	0	234.992.881,00	234.992.881,00	(100)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	282.750.134,00	295.000.000,00	(12.249.866,00)	(4,15)
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	51.801.400,00	58.884.750,00	(7.083.350,00)	(12,03)
Belanja Cetak	161.008.750,00	120.664.000,00	40.344.750,00	
Belanja Pengandaan	4.997.500,00	6.998.000,00	2.000.500,00	(28,59)
Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	47.500.000,00	2.500.000,00	5,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	117.910.000,00	118.200.000,00	(290.00,00)	(0,25)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.765.000,00	69.330.421,00	25.434.579,00	26,84
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	915.975.778,00	808.891.502,00	107.084.276,00	11,69
Belanja Pakaian Sipil Harian	60.625.000,00	57.120.000,00	3.505.000,00	5,78
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	226.250.000,00	235.459.400,00	(9.209.400,00)	(3,91)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.209.751.729,00	943.202.830,00	266.548.899,00	22,03
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	24.350.000,00	7.500.000,00	16.850.000,00	69,20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169.919.000,00	198.871.000,00	(28.952.000,00)	(14,56)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	232.745.100,00	468.288.400,00	(235.543.300,00)	(50,30)

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya	174.590.000,00	0	174.590.000,00	100
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	297.700.000,00	317.100.000,00	(19.400.000,00)	(6,12)
Belanja untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Masyarakat	32.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00	6,25
Belanja Transportasi Peserta	1.445.640.000,00	1.367.030.976,00	78.609.024,00	5,44
Belanja Akomodasi Peserta/ Panitia	280.500.000,00	341.250.000,00	(60.750.000,00)	(17,80)
<b>JUMLAH</b>	<b>8.467.681.420,60</b>	<b>8.611.569.221,39</b>	<b>143.887.793,00</b>	<b>(1,67)</b>

### 5.1.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 sebesar Rp. 2.593.633.500,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 8  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

Ursaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-pengadaan kendaraan bermotor penumpang	2.400.000.000,00	2.200.060.000,00	91,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.536.000,00	17.513.100,00	66,00
Belanja Modal Peralatan dan mesin-Pengadaan meublair	421.180.000,00	134.956.000,00	32,04
Belanja Modal Peralatan Mesin-Pengadaan alat pembersih	16.500.000,00	15.250.000,00	92,42
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin	80.360.000,00	79.556.400,00	99,00

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	1.980.000,00	99,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.550.000,00	37.200.000,00	99,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	1.400.000,00	1.386.000,00	99,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.080.000,00	6.832.000,00	96,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Video dan film	22.500.000,00	21.750.000,00	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan alat laboratorium biologi	50.000.000,00	49.300.000,00	98,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin –Pengadaan Alat Bantu Keamanan	28.298.000,00	27.850.000,00	98,42
<b>JUMLAH</b>	<b>3.093.404.000,00</b>	<b>2.593.633.500,00</b>	<b>83,84</b>

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 terdapat Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.286.372.500,00 atau 88,15 persen disebabkan karena Tahun 2018 tidak terdapat kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional dan lainnya sebagaimana terdapat pada tabel 9.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018(Rp)	Rp	%
Belanja Modal Pengadaan kendaraan bermotor penumpang	2.200.060.000,00	0	2.200.060.000,00	100

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor Lainny	17.513.100,00	25.100.000,00	(7.586.900,00)	(30,23)
Belanja Modal Peralatan dan mesin- Pengadaan meublair	134.956.000,00	57.100.000,00	77.856.000,00	57,69
Belanja Modal Peralatan Mesin- Pengadaan alat pembersih	15.250.000,00	5.250.000,00	10.000.000,00	65,57
Belanja Modal Pengadaan alat pendingin ruangan	79.556.400,00		79.556.400	100
Belanja Modal Pengadaan alat pendingin		24.600.000,00	(24.600.000,00)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Dapur	1.980.000,00	5.388.000,00	(3.408.000,00)	(63,25)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.200.000,00	128.000.000,00	(90.800.000,00)	(70,94)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal Komputer	1.386.000,00	25.768.000,00	(24.382.000,00)	(94,62)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.832.000,00	12.275.000,00	(5.443.000,00)	(44,34)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Video dan film	21.750.000,00		21.750.000,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan alat laboratorium biologi	49.300.000,00		49.300.000,00	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Personal Komputer		10.960.000,00	(10.960.000,00)	(100)

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat reproduksi (Pengganda)		6.800.000,00	(6.800.000,00)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan jaringan		775.000,00	(775.000,00)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan	27.850.000,00	5.245.000,00	22.605.000,00	81,17
<b>JUMLAH</b>	<b>2.593.633.500,00</b>	<b>307.261.000,00</b>	<b>2.286.372.500,00</b>	<b>88,15</b>

## 5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

### 5.2.1 ASET

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.183.247.247,30 dan Rp. 191.067.497,89. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 10  
Rincian Aset Lancar Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
2	Piutang Pendapatan	28.700.000,00	31.300.000,00
3	Beban dibayar dimuka	170.671.647,30	170.200.017,89
4	Persediaan	12.575.600,00	20.867.480,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>183.247.247,30</b>	<b>191.067.497,89</b>

#### 5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 00,00 atau NIHIL.

## Laporan Keuangan Tahun 2019

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11  
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2019 dan 2018

No	Jenis Kas di Bendahara	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Kas	00.00	00,00
<b>JUMLAH</b>		<b>00,00</b>	<b>00,00</b>

### 5.2.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 31.300.000,00 dan Rp. 28.700.000,00. Piutang Pendapatan Tahun 2019 sama halnya dengan piutang Tahun 2018, adalah jenis aset dari retribusi tempat pengingapan/pesanggrahan/villa yang merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum diterima pembayarannya. Terjadi pengurangan Piutang Pendapatan sebesar Rp. 2.600.000,00,-

Piutang Pendapatan Tahun 2018	Rp. 31.300.000,00
Pembayaran Piutang Tahun 2019	<u>Rp. 2.600.000,00</u>
	Rp. 28.700.000,00

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12  
Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2019 dan 2018

No	Jenis Piutang Pendapatan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Bill Tagihan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	28.600.000,00	31.300.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.600.000,00</b>	<b>31.300.000,00</b>

### 5.2.1.1.3 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 170.671.647,30 dan Rp. 170.200.017,89,-. Beban dibayar

## Laporan Keuangan Tahun 2019

dimuka merupakan pengeluaran atas belanja premi asuransi barang milik daerah berupa belanja jasa asuransi bangunan gedung mess/kantor dan belanja jasa asuransi kendaraan dinas roda 4.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13  
Rincian Beban dibayar dimuka Tahun 2019 dan 2018

No	Jenis Beban dibayar dimuka	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Belanja jasa asuransi bangunan gedung mess/kantor	64.779.273,35	64.691.654,00
	Belanja jasa asuransi kendaraan dinas roda 4	114.745.658,25	114.337.183,39
	Belanja Jasa Klaim Asuransi	900.000,00	8.100.000,00
	Penyusutan TH berjalan	(9.753.284,30)	(16.928.819,50)
	<b>JUMLAH</b>	<b>170.671.647,30</b>	<b>170.200.017,89</b>

### 5.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 12.575.600,00 dan Rp. 20.867.480,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional mess/kantor.

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut :

Tabel 14  
Rincian Persediaan Tahun 2019 dan 2018

No	Jenis Persediaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Bel. Alat Tulis Kantor	900.500,00	8.323.450,00
2	Bel.Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.329.955,00	4.065.750,00
5	Bel.Barang Cetakan	2.345.145,00	7.979.630,00
6	Bel.Alat Listrik dan Elektronik		498,650
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.575.600,00</b>	<b>20.867.480,00</b>

### 5.2.1.2 Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 35.277.256.855,76 dan Rp. 35.250.792.969,84. Aset Lancar

## Laporan Keuangan Tahun 2019

merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Aset Lancar pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 15 berikut ini :

Tabel 15  
Rincian Aset Tetap Tahun 2019 dan 2018

No	Jenis Aset Tetap	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	Tanah	0	0
	Peralatan dan Mesin	15.666.998.428,60	14.919.533.158,60
	Gedung dan Bangunan	45.492.706.027,00	45.492.706.027,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.410.000,00	184.410.000,00
	Aset Tetap Lainnya	427.475.292,00	427.475.292,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
	Akumulasi Penyusutan	(26.510.932.891,84)	(25.773.331.507,76)
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.213.767.891,78</b>	<b>35.250.792.969,84</b>

### 5.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 15.666.998.428,60 dan Rp. 14.919.533.158,60. Terjadi penambahan nilai perolehan peralatan dan mesin Tahun 2019 sebesar Rp. 747.465.270,00,-

Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin yaitu nilai perolehan dikurangi dengan Akumulasi Penyusutannya adalah sebesar Rp. 11.882.800.986,12,-

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan pada sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	14.919.533.158,60
2	Mutasi Tambah '-Pengembangan Nilai Aset	747.465.270,00
3	Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	15.666.998.428,60
4	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	(11.882.800.986,12)
5	Nilai Buku Per 31 Desember 2019	3.784.197.442,12

Mutasi tambah peralatan dan Mesin sebesar Rp. 747.465.270,00 merupakan pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Pengadaan, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin.

## Laporan Keuangan Tahun 2019

### 5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 45.492.706.027,00 dan Rp. 45.492.706.027,00 . Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 13.574.583.869,70 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp. 31.918.122.157,30  
Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan pada sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	45.492.706.027,00
2	Mutasi Tambah '-pengembangan nilai aset	
4	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	(13.574.583.869,70)
5	Nilai Buku Per 31 Desember 2019	31.918.122.157,30

### 5.2.1.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 184.410.000,00 dan Rp. 184.410.000,00 . Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (100.437.000,00) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp. 83.973.000,00.  
Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan pada sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	184.410.000,00
2	Mutasi Tambah	
4	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	(100.437.000,00)
5	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	83.973.000,00

### 5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 427.475.292,00 dan Rp. 427.475.292,00. Jumlah tersebut merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan tapi dikelompokkan dalam aset tetap lainnya yang tidak disusutkan

### 5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar (Rp.26.510.932.891,84) dan (Rp.25.773.331.507,76.)

## Laporan Keuangan Tahun 2019

---

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel 16 berikut ini :

Tabel 16  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	15.683.598.428,60	11.874.335.919,46	3.808.762.509,14
2	Gedung dan Bangunan	45.492.706.027,00	13.574.583.869,70	31.918.122.157,30
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.410.000,00	100.437.000,00	83.973.000,00
	Nilai Buku	61.360.714.455,60	25.549.356.789,16	35.810.857.666,44

### 5.2.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 1.262.632.922,40 dan Rp. 50.020.000,00,- berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi NOMOR 175/KEP-GUB/SETDA.BPBMD/2017 tentang penghapusan barang-barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Jambi pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta, telah dihapuskan barang-barang inventaris milik Badan Penghubung Daerah Jambi Di Jakarta sebesar ( Rp. 1.212.612.922,40 ) yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap karena berupa Aset Tidak Berwujud yang berupa Aset Rusak Berat.

### 5.2.4 KEWAJIBAN

#### 5.2.4.2 Utang Belanja Jasa Kantor

Nilai kewajiban Jangka pendek dalam hal ini utang belanja jasa kantor per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp. 74.182.659,00 dan Rp. 74.202.659,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilaporkan.

Rincian Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan Pada tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17  
Rincian Utang Belanja dan Jasa Kantor

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Belanja Telepon	1.246.999,00	857.920,00
Belanja Air	3.567.879,00	3.567.879,00
Belanja Listrik	56.453.081,00	56.453.081,00
Belanja Internet	12.914.700,00	12.914.700,00
Jumlah	74.182.659,00	74.202.659,00

## 5.2.5 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.19.004.123.814,46 dan 22.994.507.070,74. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

### 5.3.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 1.468.850.000,00 dan 1.404.300.000,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Jika realisasi Tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Uraian	Realisasi Menurut		Naik/Turun Rp
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan- Retribusi Daerah	1.468.850.000,00	1.471.450.000,00	2.600.000,00

### 5.3.2 Beban Operasional

#### 5.3.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 5.849.813.401,00 dan Rp. 5.173.394.189,00. Kenaikan sebesar Rp. 676.419.212,00,-.

#### 5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

## Laporan Keuangan Tahun 2019

---

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 9.468.020.979,19 dan 9.579.116.385,50, penurunan sebesar (Rp. 111.095.406,31).

### 5.3.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 737.601.384,08 dan Rp. 1.574.353.835,60,- penyusutan sebesar (Rp. 836.752.451,52,-).

### 5.3.2.4 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. (2.600.000,00) dan Rp. (4.700.000,00). Penyisihan piutang sebesar Rp. 2.100.000,00.

### 5.3.2.5 Surplus/Depisit

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar minus Rp. 14.583.985.764,27 dan Rp. 14.917.864.410,10 . Kenaikan sebesar Rp. 333.878.645,83.

## 5.4 Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

### 5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.630.290.731,13 dan Rp. 9.450.000,00.

### 5.4.2 Surplus/Depisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar minus Rp. 14.583.985.764,27 dan Rp. 14.917.864.410,10.

### 5.4.3 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.432.217.629,60 dan Rp. 13.626.333.660,39.

### 5.4.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.436.341.444.06 dan (Rp. 1.282.080.749,71)

## BAB VI PENUTUP

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2019, Badan Penghubung Daerah Provinsi dari sisi Pendapatan Retribusi masih mengalami hambatan disebabkan banyak menjamurnya Hotel-hotel disekitar Mess Badan Penghubung Daerah Provinsi dengan persaingan harga dan berlakunya edcost pada perjalanan dinas luar daerah Pegawai Negeri Sipil masih berdampak pada hunian mess pemda Jambi di karenakan pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah khususnya Ibukota Jakarta sudah jarang menginap pada mess pemda Jambi Namun usaha untuk mengatasi hambatan tersebut sudah dilakukan berbagai usaha dengan bentuk himbauan dan promosi ke Kabupaten dan Kota Se Provinsi Jambi. Dari sisi Belanja target kinerja mengalami penurunan dari dari tahun lalu, pencapaian tahun ini sebesar 88,73% ( Belanja Tidak Langsung 83,76 % dan Belanja Langsung 91,36 % ) dan sisa lebih pembiayaan anggaran 11,73% yang tidak tercapai, hal hanya diakibatkan adanya pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan harga.

Untuk itu badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Tupoksi dan Rencana Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta, pelaksanaan semua aspek kinerja selalu berupaya melakukan kerjasama dan koordinasi yang maksimal.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban OPD untuk dapat dijadikan bahan/materi dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019.